

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki keunggulan dan di sisi lain Indonesia berada pada posisi yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis¹.

Salah satu jenis bencana yang sering terjadi adalah bencana alam, bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa kerugian harta benda dan kerusakan pembangunan yang telah di bangun selama ini. Bencana alam yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam tanah, hutan, dan air secara berlebihan akibat perubahan cuaca atau iklim global telah mengakibatkan bertambahnya lahan kritis, selain itu dampaknya akan mengubah tata guna air,

¹ Ramli soehatman.2010,*Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 17

sehingga dapat mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lahan serta meningkatnya laju erosi dan sedimentasi.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Penanggulangan Risiko Bencana, menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis². Berikut adalah data bencana yang terjadi tiga tahun terakhir di Indonesia:

Tabel 1.1
Bencana Alam Di Indonesia

No	Bencana	2015	2016	2017	jumlah
1	Banjir	525	824	979	2328
2	Puting beliung	571	663	886	2120
3	Tanah longsor	502	599	848	1949
4	Kebakaran hutan	46	178	96	320
5	Letusan gunung	10	7	3	20
6	Gempa bumi	26	13	20	59
7	Gelombang pasang	7	22	11	40
8	Kekeringan	7	-	19	26
	Jumlah	1694	2306	2862	6862

Sumber: dokumen Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dalam tiga tahun terakhir bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, selain itu berdasarkan data bencana

² Definisi dan Jenis Bencana (dalam <https://bnpb.go.id/definisi-bencana> diakses tanggal 15 Agustus 2018 pukul 21.13)

banjir di Indonesia mengalami peningkatan dalam tiap tahunnya. Banjir merupakan suatu peristiwa yang terjadi saat aliran air yang berlebihan merendam suatu daratan. Banjir terjadi karena beberapa faktor yaitu: penebangan hutan, buang sampah sembarangan, pemukiman di bantaran sungai atau aliran sungai, dataran rendah, curah hujan yang tinggi, drainase yang sudah diubah tanpa memperhatikan amdal, bendungan yang jebol, salah sistem kelola tata ruang, tsunami, tanah yang tidak dapat menyerap air.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan terjadi bencana banjir, berikut data kejadian bencana banjir yang terjadi di Sumatera Barat sepanjang tahun 2016.

Tabel 1.2
Data Bencana Banjir Sumatera Barat Tahun 2016

No	Nama Daerah	Banjir
1	Kota Padang	5
2	Kota Bukittinggi	4
3	Kota Padang Panjang	-
4	Kota Sawahlunto	20
5	Kota Payakumbuh	1
6	Kota Solok	3
7	Kota Pariaman	6
8	Kabupaten Pasaman Barat	4
9	Kabupaten Tanah Datar	3
10	Kabupaten Pesisir Selatan	7
11	Kabupaten Pesisir Selatan	10
12	Kabupaten Sijunjung	3
13	Kabupaten Solok	3
14	Kabupaten Solok Selatan	5
15	Kabupaten Padang Pariaman	8
16	Kabupaten 50 Kota	9
17	Kabupaten Dhamasraya	3
18	Kabupaten Agam	10
19	Kabupaten Mentawai	12

	Jumlah	116
--	--------	-----

Sumber: laporan data dan informasi kebencanaan sumatera barat tahun 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 banjir telah terjadi sebanyak 116 kasus. Banjir terbesar terjadi di Kabupaten Sawahlunto dengan jumlah 20, dan banjir terkecil terjadi di Kota Payakumbuh dengan jumlah satu bencana, dan satu-satunya kabupaten/kota yang tidak terjadi banjir di Sumatera Barat adalah Kota Padang Panjang, jadi secara keseluruhan bencana banjir merupakan bencana yang rata-rata terjadi di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Banyaknya bencana yang terjadi di Sumatera Barat disebabkan oleh faktor geografis dan faktor alam yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia, selain itu, karena wilayah Sumatera Barat terdiri dari pegunungan. Dari data di atas juga dapat kita lihat bahwa banjir merupakan salah satu bencana yang terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota Sumatera Barat, sesuai data di atas, hanya Kota Padang Panjang satu-satunya yang tidak terkena banjir.

Mengenai banjir, pada akhir tahun 2017 terjadi banjir yang besar di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang sering terjadi banjir di Sumatera Barat, dan juga Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten yang mempunyai sejarah banjir yang besar, berikut merupakan banjir yang di kategorikan besar yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota:

Tabel 1.3
Banjir Besar Menurut BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kategori	Tahun
1	Banjir besar	1961, 1972, 1978, 1984, 2012, dan 2015

2	Sangat besar	1991, 1998, 2016, 2017
---	--------------	------------------------

Sumber: BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, Diolah 2018

Berdasarkan Tabel 1.3 semenjak 50 tahun terakhir, terjadi sebanyak 10 banjir besar di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan banjir yang paling besar terjadi yaitu pada tahun 1991 dan tahun 2017, hal itu juga dijelaskan pada wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bapak Rahmadinol, S.Pd

“... Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai sejarah banjir yang besar, dan yang terbesar adalah pada tahun 1961 dan 2017, kami mengkategorikan banjir itu berdasarkan dampaknya, lama kejadian, jumlah kerugian luas wilayah dan tingginya. (Wawancara dengan Bapak Rahmadinol S. Pd. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, pada 04/06/2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, dijelaskan bahwa banjir yang terjadi sepanjang 60 tahun terakhir terjadi 10 kali banjir yang dikategorikan besar.

Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0025'28,71" LU-0022'14,52" LS dan 100015'44,10"BT-100050'47,80" BT. Di sebelah Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung, sebelah Barat dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, serta sebelah Timur dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Berdasarkan dari letak Geografis dan Topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi bencana banjir yang besar. Banjir juga merupakan bencana yang paling sering terjadi di kabupaten lima puluh kota. Untuk tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai

dengan tahun 2017 banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di kabupaten lima puluh kota. Berikut data banjir dalam tiga tahun terakhir di kabupaten lima puluh kota.

Tabel 1.4
Data Kebencanaan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Bencana	2015	2016	2017	jumlah
1	Angin kencang	14	1	9	24
2	Longsor	12	23	12	47
3	Banjir	28	26	21	75
4	Pohon tumbang	5	3	8	16
5	Jalan amblas	4	4	3	11
	Jumlah	67	57	53	177

Sumber: Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, selain itu banjir untuk tiga tahun terakhir di kabupaten lima puluh kota juga menurun tiap tahunnya.

Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat pada Jumat 3 Maret 2017 membuat Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tanggap darurat bencana selama 7 hari. Tanggap darurat bencana berlangsung pada 3-9 Maret 2017³. Bencana banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota telah memberikan dampak kerugian kepada masyarakat. Sebanyak 8 Kecamatan dan 13 Nagari terdampak langsung dari banjir dan longsor yang meliputi Kecamatan Pangkalan, Kapur IX, Mungka, Harau, Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Suliki, dan Bukit Barisan, terdapat lima warga meninggal dunia akibat longsor di

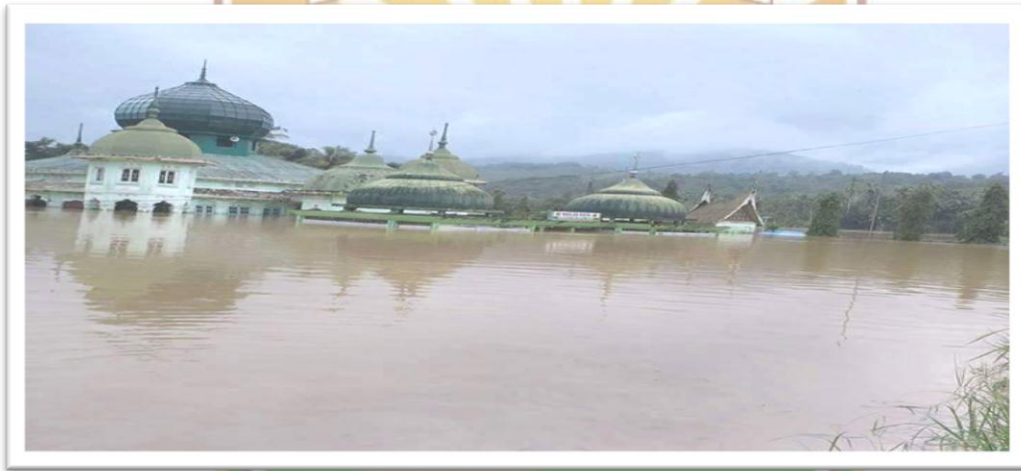
³Banjir dan Longsor di Kabupaten Limapuluh Kota Sumbar, Lima Tewas/<https://news.okezone.com/read/2017/03/04/340/1634333/banjir-dan-longsor-di-kabupaten-limapuluh-kota-sumbar-lima-tewas/> di akses pata pukul 21.12 tanggal 6 agustus 2108

Kabupaten Limapuluh Kota. Korban adalah Doni Fernandes (31), Teja (19), Yogi Saputra (23), Muklis alias Ujang (45), dan Karudin (25). Dan dua orang luka berat yaitu Syamsul Bahri (22) dan Candra (42). Ratusan rumah terendam banjir seperti di 150 rumah di Jorong Ranah Pasar, 50 unit rumah di Jorong Ranah Baru, 50 unit rumah di Jorong Abai. Dan akibat longsor, jalan penghubung Sumatera Barat - Riau putus. Di kelok 17 terdapat 4 titik longsor. Delapan mobil tertimpa longsor di Km 17 Koto Alam⁴. Berikut pada gambar 1.1 terlihat bencana banjir yang terjadi di Lima Puluh Kota.



Gambar 1.1
Banjir yang terjadi di kabupaten 50 kota

⁴Banjir dan Longsor di Kabupaten Limapuluh Kota Sumbar, Lima Tewas/
<https://news.okezone.com/read/2017/03/04/340/1634333/banjir-dan-longsor-di-kabupaten-limapuluh-kota-sumbar-lima-tewas> , diakses pukul 21.13 pada tanggal 07 agustus 2018



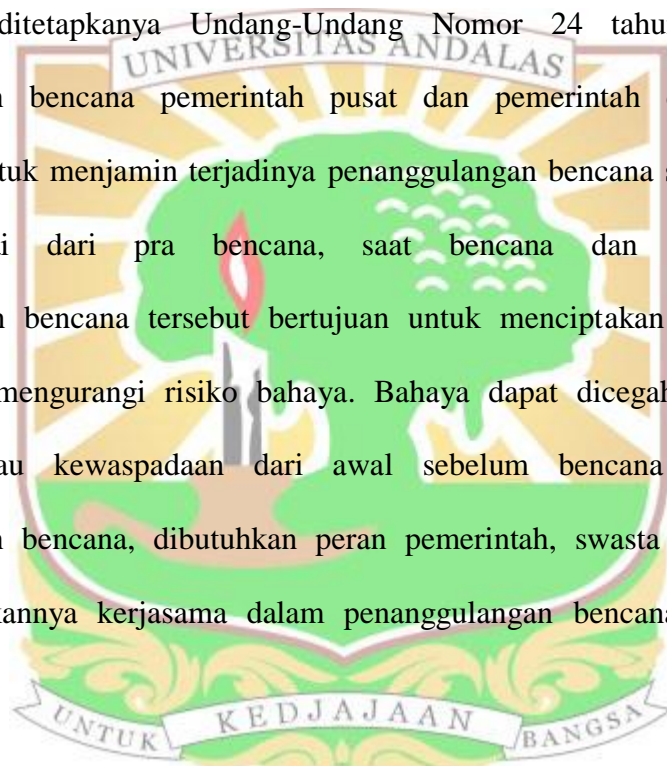
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten 50 Kota Tahun 2017

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 telah memutuskan jalan lintas antara Sumatera Barat dan Riau, dan juga merendam beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Banjir memberikan dampak kerugian kepada pelayanan publik, terutama pada sarana dan prasarana dan korban jiwa, dan juga merusak pada perekonomian oleh karena itu pemerintah harus bertanggungjawab terhadap upaya penanggulangan bencana, penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat dan pasca bencana, penanggulangan bencana ini meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana, jaminan pemenuhan masyarakat, korban dan pengungsi yang terkena dampak banjir. Pemerintah harus menjamin pemulihan kondisi dari masyarakat yang terkena dampak bencana.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjamin terjadinya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Penanggulangan bencana tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman dengan mengurangi risiko bahaya. Bahaya dapat dicegah dengan adanya kesadaran atau kewaspadaan dari awal sebelum bencana terjadi. Dalam penanggulangan bencana, dibutuhkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan dilakukannya kerjasama dalam penanggulangan bencana pada saat pra-bencana⁵.



Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 35 dan 36 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana mempunyai perencanaan dan membentuk suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulanagan bencana, untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pemerintah telah membentuk Badan Penanggulanag Bencana Daerah Kabupaetn Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, sedangkan fungsinya yaitu⁶

- 
1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
 3. Menyusun, menetapkan, dan mengimpormasikan peta rawan bencana
 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁶ Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 7 tahun 2011 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam melaksanakan tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumasan dan penetapan kebijakan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu dan menyeluruh.



Untuk menunjang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan beberapa penghargaan terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dianggap telah berprestasi dalam hal penanggulangan bencana, adapun yang mendapat penghargaan adalah sebagai berikut⁷

Tabel 1.5
Daftar BPBD Berprestasi Tahun 2018

Wilayah	Tingkat	Peringkat 1	Peringkat 2	Peringkat 3
1 (Indonesia bagian timur)	Provinsi	Sulawesi Utara	Maluku	Papua
	Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Kota Gorontalo	Kabupaten Sula
2 (Indonesia bagian tengah)	Provinsi	Jawa Tengah	Bali	Jawa Timur
	Kabupaten/Kota	Purworejo	Magelang	Solo
3 (Indonesia bagian barat)	Provinsi	Sumatera Selatan	Aceh	Riau
	Kabupaten/Kota	Kota Medan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Serang

Sumber : <https://news.detik.com/berita/3881159/ini-daftar-bpbd-terbaik-versi-bnpb>, diolah, 2018

⁷ Badan penanggulangan bencana berprestasi nasional/ [www](https://news.detik.com/berita/3881159/ini-daftar-bpbd-terbaik-versi-bnpb)

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa dari keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendapatkan penghargaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu-satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Adapun alasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat penghargaan dari pusat adalah karena dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Pangkalan, mulai dari awal proses menggulangi banjir sampai kepada proses penyaluran bantuan *Cash For Work* (CFW). Hal tersebut juga dijelaskan oleh wawancara kepala bidang Kedaruratan dan Logistik, Bapak Rahmadinol, S.Pd.

“...BPBD 50 Kota merupakan satu satunya BPBD tingkat kabupaten dan kota Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan nasional, hal itu kami dapatkan dalam menanggulangi bencana pada tahun 2017, dan puncaknya pada bencana banjir besar yang terjadi di kabupaten Pangkalan Koto Baru. mulai dari awal proses penanggulangan, evakuasi korban, penyaluran bantuan, yaitu dalam penyaluran bantuan *Cas for work*” (wawancara dengan bapak Rahmadinol S.Pd. kabihad kedaruratan dan logistik, pada 04/06/2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bapak Rahmadinol, S.Pd dijelaskan bahwa BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu-satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Sumatera Barat yang mendapat penghargaan, dan penanggulangan banjir merupakan alasan utama mendapat penghargaan terutama banjir dan tanah longsor di Pangkalan. Hal

demikian juga disampaikan oleh kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bapak Hj Joni Amir, S. Sos

“...Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten lima puluh kota mendapatkan penghargaan karena dianggap Tangguh dalam menanggulangi bencana sepanjang tahun 2017, faktor utama kami mendapatkan penghargaan tersebut adalah dalam penanganan banjir sepanjang tahun 2017, dan puncaknya pada penanganan banjir di pangkalan pada tahun 2017.” (wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh kota pada 04/06/2018, pukul 08.30 WIB)



Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Hj Joni Amir S. Sos dijelaskan bahwa alasan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan penghargaan adalah dalam penanganan banjir sepanjang tahun 2017, badan penanggulangan bencana dinilai berhasil dalam menanggulangi bencana banjir, dan puncaknya pada banjir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Berikut pada Gambar 1.2 terlihat penghargaan yang di berikan kepada BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017.

Gambar 1.2
Penghargaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berprestasi Nasional



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2017

Untuk berhasil dalam penanggulangan bencana, terutama banjir ada beberapa tahapan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat pada tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.6
Tahapan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir

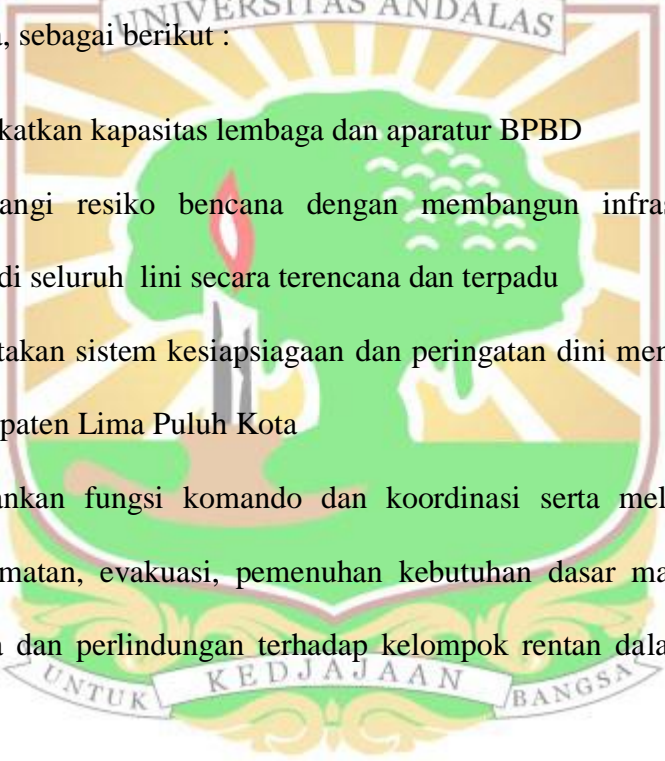
No	Pra bencana	Saat bencana	Pasca bencana
1	Peringatan dini	Evakuasi masyarakat	Membersihkan lingkungan yang terkena dampak banjir
2	Mitigasi Bencana	Mendirikan pos komando	Memberikan bantuan berupa kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit, dan bantuan logistic
3	Kesiap siagaan	Mendirikan tempat pengungsi	Pemberian bantuan <i>cash for work</i>
4		Membuat SK tanggap darurat	Membuat laporan secara rinci dalam penanggulangan bencana

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.6 dijelaskan bahwa untuk menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu adanya penanggulangan pada saat pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pra bencana melakukan upaya untuk mengurangi resiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, membentuk Kelompok Siaga Bencana dan juga melakukan peringatan dini pada saat kemungkinan terjadinya bencana banjir, selanjutnya pada saat terjadinya bencana BPBD melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terkena banjir, mendirikan pos komando untuk menanggulangi banjir, selanjutnya juga mendirikan tempat pengungsi. Dan juga pada saat pasca bencana BPBD juga memberikan bantuan pembersihan lingkungan, memberikan bantuan kesehatan, dan juga pemberantasan penyakit, dan disini juga BPBD menyalurkan bantuan kebersihan rumah atau *cash for work*.

Sebelum terjadinya bencana, perlu adanya penanggulangan yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana banjir, karena pada tahapan pra bencana merupakan tahapan awal untuk menanggulangi bencana banjir, maka dari itu perlu adanya perencanaan untuk penanggulangan bencana banjir dan juga upaya untuk mengurangi dampak banjir, selain itu juga perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta masyarakat untuk menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk berhasil dalam menanggulangi bencana banjir sehingga mendapatkan suatu penghargaan maka perlu adanya strategi dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk dengan visi: "Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Cepat, Tepat, Terencana, Dan Terintegrasi". Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan dan ditetapkan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima puluh Kota, sebagai berikut :

- 
1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur BPBD
 2. Mengurangi resiko bencana dengan membangun infrastruktur tanggap darurat di seluruh lini secara terencana dan terpadu
 3. Menciptakan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota
 4. Menjalankan fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masa tanggap darurat
 5. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan pada masa krisis
 6. Membangun kemitraan dengan seluruh stakeholders dalam masa normal dan bencana

Untuk mencapai visi dan misi tersebut dalam penanggulangan bencana banjir pada tahapan pra bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai program. namun dalam penanganan banjir sendiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mempunyai program khusus. tapi secara keseluruhan untuk menanggulangi bencana banjir di tahun 2017 pada tahapan pra bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai program yaitu: “pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam”. Sebagaimana juga di jelaskan pada wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bapak Ariffadillah, SE

“...Secara khusus, kami tidak mempunyai program untuk menanggulangi bencana banjir karena banjir merupakan bencana tahunan yang terjadi di kabupaten lima puluh kota, namun secara keseluruhan untuk menanggulangi sebelum terjadinya banjir kami menanggulangi melalui program meningkatkan kesiap siagaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.” (wawancara dengan Bapak Ariffadillah, SE Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, pada 08/11/2018, pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bapak Ariffadillah, SE dijelaskan bahwa untuk menanggulangi bencana banjir secara khusus badan penanggulangan bencana daerah kabupaten lima puluh kota tidak mempunyai program khusus, namun secara keseluruhan untuk menanggulangi banjir pada saat pra bencana badan penanggulangan bencana menanggulangi melalui program **Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**. Dalam

menjalankan program ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan beberapa kegiatan yaitu⁸

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
2. Pengadaan perlengkapan peralatan SAR
3. Piket Pos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur tentang Penanggulangan Bencana
5. Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan
6. Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan Bencana
7. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
8. Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana

Dalam menjalankan kegiatan untuk tercapainya kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam menanggulangi bencana. Untuk sumber daya manusia sendiri badan penanggulangan bencana daerah mempunyai memiliki 50 sumber daya manusia, termasuk Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. untuk menjalankan penanggulangan bencana sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 50 orang dinilai kurang. Sebagaimana dijelaskan pada wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Ibuk Ernita, SH, S. Sos

⁸ Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

“...dalam menanggulangi bencana dengan jumlah sumber daya yang ada kami merasa kekurangan, terutama dalam hal penanggulangan pada saat pra bencana karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten” (wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ibuk Ernita, SH, S.Sos pada 08/11/2018, pukul 13.00)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijelaskan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota. karena dalam penanggulangan bencana banjir diperlukan sumber daya manusia yang cukup dan juga kompeten dan juga tidak adanya pelatihan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap sumber daya aparaturnya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut maka dibentuklah Kelompok Siaga Bencana, dimana Kelompok Siaga Bencana (KSB) sangat diharapkan dapat membantu pemerintah terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain itu juga diharapkan dapat membantu masyarakat dengan cepat karena Kelompok Siaga Bencana dapat dengan cepat dan mudah menjangkau wilayahnya yang terkena bencana.

Berdasarkan surat keputusan pembentukan Kelompok Siaga Bencana Surat Keputusan Wali Nagari Mungka nomor 75 tahun 2016 tentang penetapan Nama-Nama Relawan Atau Kelompok Siaga Bencana Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Kelompok Siaga Bencana mempunyai tugas sebagai berikut yaitu: Relawan atau Kelompok Siaga Bencana bertugas sebagai tenaga kerja

relawan nagari dimana dia berasal dan dapat di panggil sewaktu-waktu untuk tugas kebencanaan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh. Mengenai pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut data tentang Kelompok Siaga Bencana yang terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk pembentukan Kelompok Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyerahkan kepada nagari yang diwakili oleh wali nagari untuk menunjuk orang-orang yang dianggap kompeten dalam bidang penanggulangan bencana untuk masing-masing nagari, masing-masing nagari mengirim 30 orang untuk menjadi anggota KSB. Sebagaimana wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bapak Ariffadillah, SE

“...BPBD membentuk KSB secara bertahap untuk masing-masing nagari, untuk penunjukan kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak nagari untuk menunjuk orang-orang yang dianggap kompeten dalam penanggulangan bencana untuk masing-masing nagari. Dan bagi yang terpilih sebagai anggota KSB sebanyak 30 orang akan dilantik oleh BPBD setelah itu akan kami lakukan pelatihan dan pembekalan dalam penanggulangan bencana.” (Wawancara Dengan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bapak Ariffadillah, SE pada 04/06/2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dijelaskan bahwa dalam pembentukan, KSB dibentuk secara bertahap untuk masing-masing nagari, dan setelah itu dilantik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya akan di berikan pelatihan

dan pembekalan dalam penanggulangan bencana. Berikut data pembentukan kelompok siaga bencana pada tahun 2015 sampai 2018.

Tabel 1.7
Kelompok Siaga Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Jumlah Nagari Dan Tahun Dibentuk			
		2015	2016	2017	2018
1	Payakumbuh	3	1	1	1
2	Akabiluru	3	1	1	
3	Luak	2	1	1	
4	Lareh Sago Halaban	2	1	2	1
5	Situjuah Limo Nagari	3	1		2
6	Harau	5	1	2	2
7	Guguah	2	1	1	
8	Mungka	2	1	1	
9	Suliki	3	1		
10	Bukit Barisan	3	1	1	1
11	Gunuang Omeh	2	1		
12	Kapur Ix	3	1	1	
13	Pangkalan Koto Baru	2	1	1	1
Jumlah		35 Nagari	13 Nagari	12 Nagari	8 Nagari

Sumber: BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel 1.7 dijelaskan bahwa BPBD kabupaten Lima Puluh Kota telah membentuk 35 KSB pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan 13 KSB pada tahun 2016, 12 KSB tahun 2017 dan pada tahun 2018 telah dibentuk 8 KSB. Dan dalam perencanaannya ada beberapa KSB yang akan di bentuk pada tahun 2018.

Setelah dibentuknya Kelompok Siaga Bencana seharusnya ada pelatihan dan pembekalan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap KSB, namun hal demikian belum dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, karena adanya pemangkasan anggaran pada tahu 2016 dan 2017, yang menyebabkan program dan

kegiatan tidak berjalan sesuai semestinya. Seharusnya dalam pelatihan KSB harus dilakukan, tetapi KSB hanya diberikan pengetahuan tentang penanggulangan bencana banjir pada saat pelantika KSB saja. berikut merupakan rekap anggraran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013 sampai dengan 2018.

Tabel 1.8
Rekap anggaran BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013-2018

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
1	2013	3.895.902.200
2	2014	5.117.295.400
3	2015	6.396.724.500
4	2016	6.423.362.700
5	2017	2,612,892,350
6	2018	1,889,985,045

Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

Pada Tabel 1.8, terlihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 terjadi pengurangan anggaran yang signifikan, yaitu kurang lebih sebesar 3.810.470.350 hal demikian menyebabkan program dalam penanggulangan bencana pada saat pra bencana kurang berjalan dengan semestinya. Sebagaimana juga dijelaskan pada wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bapak Ariffadillah, SE

“...pada tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang masih belum terlaksana dengan baik, hal demikian di akibatkan karena adanya pemangkasan anggraran besar besaran yang di lakukan, hal itu membuat kami kesulitan dalam melakukan kegiatan, karna dalam penanggulangan bencana memerlukan biaya yang besar.” (wawancara dengan bapak Ariffadillah, SE. Kepala Bidang Pencegahan Dan kesiapsiagaan pada 04/06/2018, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Ariffadillah, SE dijelaskan bahwa dengan adanya pemangkasan anggaran pada tahun 2016 dan 2017 menyebabkan kegiatan dalam hal penanggulangan bencana pada saat pra bencana tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Seperti dalam halnya untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten, maka dari itu diperlukan pelatihan baik itu untuk aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun untuk Kelompok Siaga Bencana bahkan masyarakat.

Dalam melaksanakan penanggulangan banjir pada tahapan pra bencana perlu adanya persiapan sarana dan prasarana yang mendukung, selain itu juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat tentang ancaman banjir, tetapi pada kenyataannya untuk hal sarana dan pra sarana masih kurang, selain itu kesadaran dari masyarakat masih kurang, karena banyak nya masyarakat yang berfikir bahwa penanggulangan bencana diurus setelah terjadinya bencana. Selain itu masyarakat juga masih enggan dalam menanggapi himbauan peringatan dini terjadinya banjir, masyarakat masih enggan untuk meninggalkan tempat tinggalnya ketika adanya potensi banjir, sebagaimana dijelaskan pada Wawancara Dengan Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Bapak Rahmadinol S. Pd

“...untuk menanggulangi bencana pada tahapan pra bencana perlu adanya kesadaran dari masyarakat akan bahaya banjir tersebut, namun kenyataannya masyarakat masih kurang peduli terhadap itu, dan juga masyarakat masih enggan meninggalkan tempat tinggal mereka ketika sudah adanya peringatan dini akan terjadinya bencana banjir, karena

masyarakat masih banyak yang berfikir bahwa bencana diurus setelah terjadinya bencana” (wawancara Dengan Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Bapak Rahmadinol S. Pd pada 04/06/ 2018 pukul 10.15)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik dijelaskan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana, selain itu kurang diresponya himbauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap ancaman bencana, seperti ketika terjadinya hujan deras yang berpotensi banjir masyarakat masih enggan untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menemukan beberapa masalah yang peneliti temukan di lapangan antara lain: Adanya pengurangan anggaran yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017, peneliti berasumsi dengan adanya pengurangan anggaran tersebut menyebabkan beberapa dari program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak berjalan sesuai semestinya

secara keseluruhan peneliti menemukan bahwa program yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya berhubungan dengan pelatihan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap aparatur maupun masyarakat dan Kelompok Siaga Bencana masih belum berjalan sesuai semestinya, sehingga jika dilihat dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum berjalan sesuai semestinya.

Walaupun demikian dengan adanya kekurangan tersebut tidak menghambat keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menanggulangi bencana terutama bencana banjir, hal itu dibuktikan dengan terjadinya penurunan jumlah banjir dalam tiga tahun terakhir, dan juga dalam penanggulangan bencana banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat prestasi terbaik kedua wilayah tiga tingkatan kabupaten/kota nasional.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dilapangan, dengan adanya pengurangan jumlah banjir pada tiga tahun terakhir dan adanya prestasi yang didapat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota peneliti berasumsi bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Berhasil dalam menanggulangi bencana banjir. Untuk berhasil dalam menanggulangi bencana banjir maka perlu adanya strategi, maka dari itu peneliti ingin melihat dan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Banjir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktisnya penelitian ini di harap dapat memberikan masukan, acuan dan sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan serta sebagai kontibusi dalam Administrasi Publik terutama dalam penanggulangan bencana dan juga manfaan untuk penelitian yang akan datang.

